



KETIKA KREDIT TAK LAGI MENGUCUR

Usaha Macet, UKM Jalan di Tempat

Cerita pilu pascagempa dua tahun lalu, kini masih terdengar parau. Banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) belum mampu bangkit. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terjatuh utang di bank dan tak mampu melunasi. Akibatnya, mereka tak lagi menerima kucuran kredit. Usahanya macet, mereka pun hanya berjalan di tempat. Yang terang, mereka perlu *cash money* untuk menggerakkan usahanya. Tapi dari mana jika bank tak meminjam?

BENCANA gempa dua tahun lalu, masih menyisakan penderitaan bagi sejumlah usaha kecil menengah (UKM) yang masuk dalam daftar korban gempa. Bagaimana tidak, usaha yang digeluti sejak beberapa tahun lalu terpaksa berhenti atau mendekati kebangkrutan. Modal usaha habis, sementara pinjaman di bank masih menumpuk. "Untuk meminjam modal di bank tak bisa lagi karena tak ada bank yang percaya akibat tunggakan yang kami tanggung," ujar Eny, nama samaran, seorang pengusaha beras dan daging ayam di daerah Tirtonirmolo Kasihan Bantul.

Tak ada lagi bank yang peduli memberi pinjaman kepada pelaku UKM seperti Eny. Bahkan, Eny menegaskan bahwa jika ada pelaku UKM warga Bantul yang ke bank, maka namanya sudah terpampang sebagai kreditur macet. Padahal, untuk mengembalikan atau menggerakkan roda usahanya, pelaku UKM semacam Eny butuh suntikan modal.

"Jika tak boleh pinjam modal di bank lagi, maka tunggakan kredit kami tak akan bisa kami lunasi," keluhnya. Akibat mandeknya usaha karena tak ada modal, maka sertifikat tanah miliknya yang dijadikan jaminan bank terancam disita.

Ia menyalahkan sikap bank yang mem-*blacklist* seluruh UKM yang masih mempunyai kredit dan macet akibat gempa bumi. Padahal, jika seorang pelaku UKM masih menung-gak kredit di suatu bank, maka bank lain, baik swasta maupun milik pemerintah akan mengetahuinya. Artinya, kesempatan untuk memperoleh pinjaman bank sudah tertutup.

1. V
2. V
3. S
4. A

Sedangkan tanpa suntikan modal dari bank, Eny tak bakalan bisa meneruskan usaha atau mencicil kredit bank yang menjadi tanggungannya.

Bupati Bantul Drs HM Idham Samawi mengaku sangat prihatin dengan sikap bank yang telah mem-*blacklist* seluruh UKM di Bantul yang tak bisa mengangsur kredit pascagempa bumi 2 tahun lalu. Sikap tersebut menunjukkan bah-

wa bank masih belum berpihak kepada rakyat secara penuh. "Kami sudah berkali-kali mendapat keluhan langsung dari pelaku UKM yang kesulitan mendapat kredit dari bank. Mereka memang masih mempunyai kredit di bank, sehingga namanya terdaftar di seluruh bank yang ada dan tak mungkin bisa mendapatkan kredit dari bank manapun sebelum melunasi utangnya. Jika sikap semua bank seperti itu, maka para pelaku UKM tak mungkin bisa melunasi utangnya. Karena tak bisa menjalankan usahanya akibat tak ada modal," katanya.

Untuk itu Pemkab Bantul akan mendobrak kebijakan bank, terutama bank milik pemerintah agar bisa bersikap bijaksana terhadap pelaku UKM korban gempa.

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (Asppuk) mencatat puluhan UKM di lima kecamatan di Bantul perlu dibantu. Di antaranya di Kecamatan Pandak, Pundong, Pleret dan Bambanglipuro. "Sebelum gempa mereka justru banyak terjatuh utang bank-bank tidak resmi alias bank *plecit*," ujar Jatmiko dari Asppuk yang selama setahun melakukan pendampingan dalam bentuk lembaga keuangan mikro. Dana untuk keperluan ini berasal dari Ford Foundation.

Selain bank *plecit*, kata Jatmiko, beberapa UKM itu memang berhubungan dengan bank-bank perkreditan rakyat

JUMLAH UMKM & NILAI KREDIT YANG DIHARAPKAN DIBANTU PEMDA DIY

No	Haircut (Kredit s.d. Rp 5 juta dan Koperasi)	Usaha Mikro	Kredit (Rp M)	Haircut	Nilai Haircut (Rp M)
1.	Dalam Perhatian Khusus	313	2.456	20%	0.491
2.	Kurang Lancar	164	0.569	20%	0.114
3.	Diragukan	265	0.869	40%	0.348
4.	Kredit Macet Non Koperasi	771	2.364	60%	1.418
5.	Kredit macet di Koperasi	29	0.195	60%	0.119
Jumlah		1.544	6.413	-	2.500

Jumlah Nasabah Usaha Mikro : 1.544 orang | Nilai Kredit : Rp 6,413 miliar |
 Jumlah bantuan untuk Haircut : Rp 2,5 miliar

SUMBER: KOMITE PERENCANAAN PEKERJAAN EKONOMI (KPEPE) "YO BANGKIT" KH-BAMBANG N.

Negatif
 Positif
 Amat se
 Segera

Din. Pen. indagkop

yang cenderung menerapkan bunga tinggi. Meski begitu, pascagempa mereka tetap tak memperoleh keringanan pengembalian utang.

Belum 100 Persen

Dua tahun pascagempa, belum semua UKM di Kabupaten Bantul bangkit. Masih banyak permasalahan yang harus dihadapi pelaku UKM. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul Drs Yahya mengakui, meski sudah banyak UKM yang bangkit, tapi belum bisa mencapai 100 persen. "Tapi, yang jelas UKM yang bangkit jumlahnya lebih banyak dari pada yang belum," katanya. Namun pihaknya tidak bisa merinci berapa jumlah UKM yang masih terseok-seok ini karena belum melakukan survei lapangan.

Berdasar pendataan Disperindagkop, jumlah pelaku UKM yang menjadi korban gempa di Bantul sekitar 3 ribu orang. "Yang tidak terdata lebih banyak lagi," ucapnya seraya mengakui masih ada sejumlah UKM yang terkendala utang.

Dikemukakan, dari pihak perbankan juga sudah melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) pengunduran pembayaran selama 3 bulan. Namun setelah habis masa tenggangnya tetap harus membayar secara penuh.

Yahya mengemukakan, untuk membantu UKM korban gempa Pemkab telah menjalankan berbagai program. Untuk tahun anggaran 2008, Pemkab juga mengalokasikan Rp 2,2 miliar khusus untuk membantu para pelaku industri kecil yang terkena gempa.

Sedang di Kota Yogya, Ketua Koperasi Produksi Pengusaha Perak Yogyakarta (KP3Y) Sutojo mengungkapkan, pascagempa bumi banyak perajin skala rumah tangga yang berhenti produksi. Mereka memilih menjadi tukang batu atau tukang kayu karena kehabisan modal. Sementara bagi perajin yang masih eksis hanya menjadi buruh bagi pengepul maupun perusahaan besar. "Karena mereka harus menghidupi keluarga akhirnya bekerja seadanya," kata Sutojo.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sudah melakukan sejumlah upaya untuk menyelamatkan UKM. Pada tahap awal Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Yogyakarta memberikan bantuan kepada 192 UKM di 3 kelurahan (Sorosutan, Purbayan dan Prenggan) dengan total bantuan mencapai lebih dari Rp 110 juta.

"Bantuan diberikan sesuai dengan nilai kerugian yang diderita," kata Kabid Bimbingan Teknis, Bambang Supriatna. Hingga 2 tahun pascagempa kondisi UKM belum sepenuhnya bangkit. Namun terkait jumlah perajin yang tidak bisa mengembalikan pinjaman modal pihaknya tidak tahu pasti.

Sulitnya melacak para pelaku UKM korban gempa bumi yang memiliki masalah di bank, menurut Kabid Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal (P2KPM) Sleman, Ir Sri Titik Rahayu Untari, disebabkan tidak adanya laporan ke instansinya, baik dari bank maupun UKM bersangkutan. "Kami memiliki data tentang pelaku UKM di Sleman yang menjadi korban gempa. Namun kami tidak mengetahui mana saja yang punya pinjaman di bank," tandasnya.

Menurut Kasi Pengembangan Usaha Bidang Perindustrian Dinas P2KPM Sleman, Dwidjo Putra BSC, secara umum pelaku UKM korban gempa di Sleman banyak yang berhasil bangkit. Sejak tahun 2007, sebagian UKM korban gempa, menambah modalnya dengan pinjaman khusus dari Bank Mandiri bekerjasama dengan Dinas P2KPM.

Berdasarkan data di Dinas P2KPM Sleman, ada 953 unit usaha yang tersebar di wilayah sentra dan non sentra usaha di Kabupaten Sleman yang mengalami kerugian akibat gempa bumi 27 Mei 2006 lalu. Beban utang yang ditanggung para pelaku unit usaha (di luar kerugian tempat, alat dan barang) mencapai Rp 146 juta. Sedangkan kebutuhan *recovery* akibat kerugian itu, untuk modal sebanyak Rp 2,559 miliar lebih dan untuk investasi Rp 1,720 miliar lebih. Terbanyak di Kecamatan Godean (305 unit usaha) dan Seyegan (202 unit usaha). Jenis usaha di kedua kecamatan itu adalah industri genteng, menyerap 1.454 tenaga kerja. □ -e

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005